

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh negara tersebut. Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan pada distribusi output dan struktur ekonomi, peningkatan kontribusi pada sektor industri dan jasa, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja (BPS Provinsi Bali, 2014)

Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang menjadi keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan haruslah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan

terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti di perlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi selain tingkat kemiskinan adalah pengurangan ketimpangan di mana semua negara pastinya sedang berusaha mengatasi masalah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketimpangan pendapatan di mana pertumbuhan yang tinggi tidak bisa dijadikan acuan bahwa ketimpangan pendapatan akan rendah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan (sekitar 7 % / tahun), tetapi tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinannya relatif tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketimpangan pendapatan daripada pertumbuhan ekonomi (Joko Waluyo, 2004).

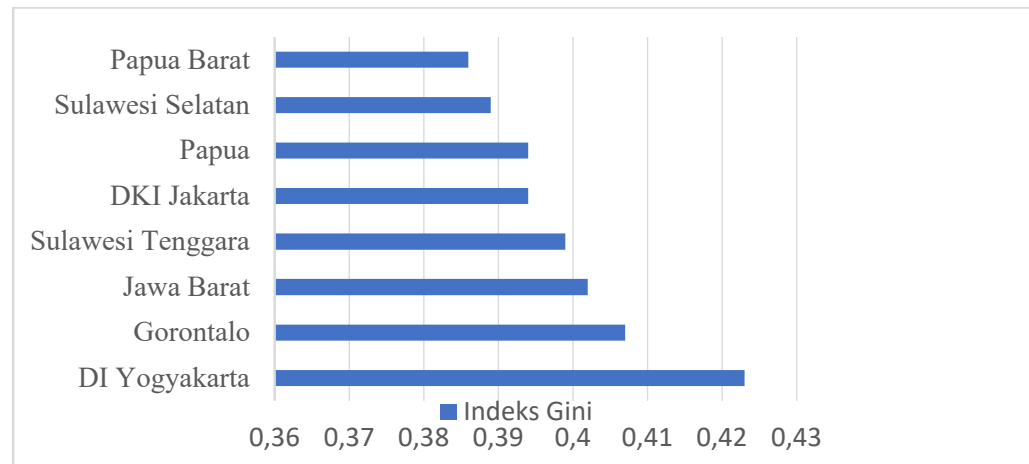
Berdasarkan pengukuran tingkat ketimpangan yang menggunakan Indeks Gini sebagai metode pengukuran, Indonesia berada di peringkat 62 dengan Indeks Gini 0,395. Angka tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di benua Afrika dan Amerika Selatan di mana posisi teratas ditempati oleh Botswana dengan Indeks Gini sebesar 0,626 disusul oleh Afrika Selatan dengan Indeks Gini 0,623. Data tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan yang terjadi di negara tersebut sangat tinggi (cnbcindonesia.com, 2018).

Meskipun terkena imbas dari krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997-1998, Indonesia telah dianggap sukses dalam mengatasi masalah kemiskinan yang

terjadi selama 30 tahun. Dalam 3 dekade terakhir, kondisi sosial ekonomi Indonesia telah meningkat. Bank Dunia melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia naik dari \$491,58 (1980) menjadi \$516,96 (2015). Dari 1980 hingga 2015, output sektor pertanian dalam PDB terus menurun sejak tahun 1980 sedangkan sektor industri dan sektor jasa terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain PDB mengalami peningkatan, ketimpangan pendapatan juga menunjukkan kecenderungan meningkat setelah berakhirnya krisis ekonomi 1997-1998. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan Indonesia sudah masuk taraf sedang sejak tahun 2005. Nilai ketimpangan tersebut bisa lebih tinggi di daerah perkotaan, di mana selama periode 2012-2017 nilai Gini rasionya tidak pernah turun dari angka 0,4.

Menurut Wihardja (2016), salah satu penyebab tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia setelah tahun 2000 antara lain deindustrialisasi ini akibat mini *Dutch Disease* yang ditimbulkan oleh *commodity price booming*. Apresiasi nilai tukar rupiah akibat peningkatan ekspor komoditas menyebabkan sektor selain ekspor alam kurang kompetitif di pasar internasional, termasuk sektor industri. Hal ini menyebabkan *share* sektor industri menurun dan transformasi ekonomi justru terjadi di sektor pertanian ke sektor jasa yang bersifat informal. Gambar 1.1 menunjukkan 8 Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia.



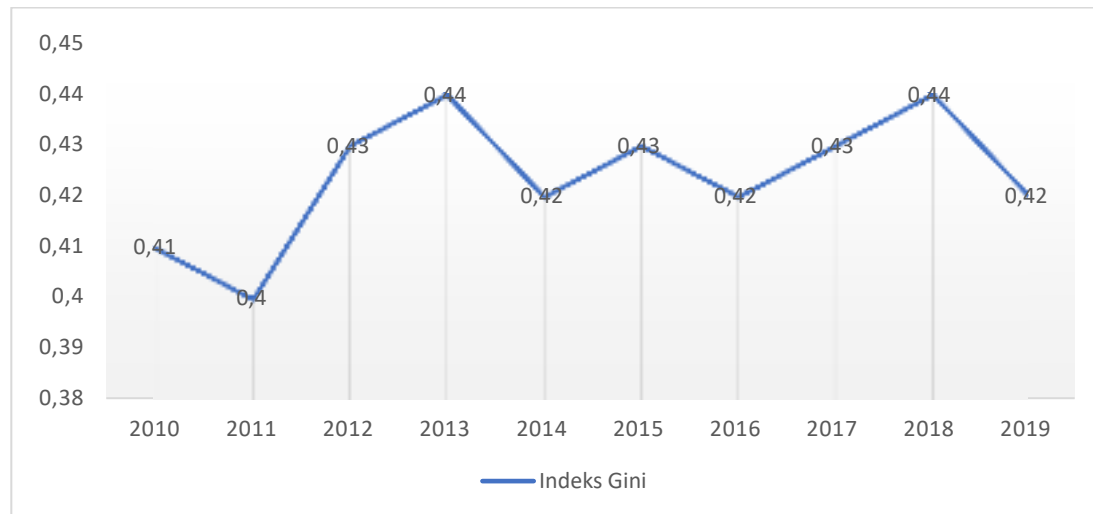
Sumber : BPS DIY 2019

**Gambar 1.1**  
**8 Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia**

Tingkat ketimpangan atau *Gini Ratio* di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 0,382. Angka ketimpangan ini menurun 0,002 dibandingkan September 2018 yang mencapai 0,384.

Ketimpangan ditunjukkan dengan *gini ratio* untuk mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk dengan kisaran 0 untuk pendapatan merata sempurna hingga 1 untuk ketimpangan pendapatan sempurna. Ada delapan provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas Rasio Gini Nasional, yakni Provinsi DI Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399), DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,386).

DIY merupakan Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan tingkat ketimpangan DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2019.



Sumber : BPS DIY (2019)

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan ketimpangan di Wilayah DIY**

Untuk mengurangi tingkat ketimpangan, DIY telah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang baik dan tepat. Hal ini menjadi penting karena menjadi pondasi dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nantinya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat DIY. Hal tersebut ditunjukkan tumbuhnya ekonomi DIY (Tabel 1.1)

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PDRB Wilayah DIY (Rp. Juta)**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16	4,49	5,05	5,26	6,20

Sumber : BPS DIY (2019)

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 melaju lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,26 persen, sementara tahun 2018 tumbuh menjadi 6,20 persen. Jalur tren laju pertumbuhan ekonomi meningkat sudah dimulai pada tahun 2016.



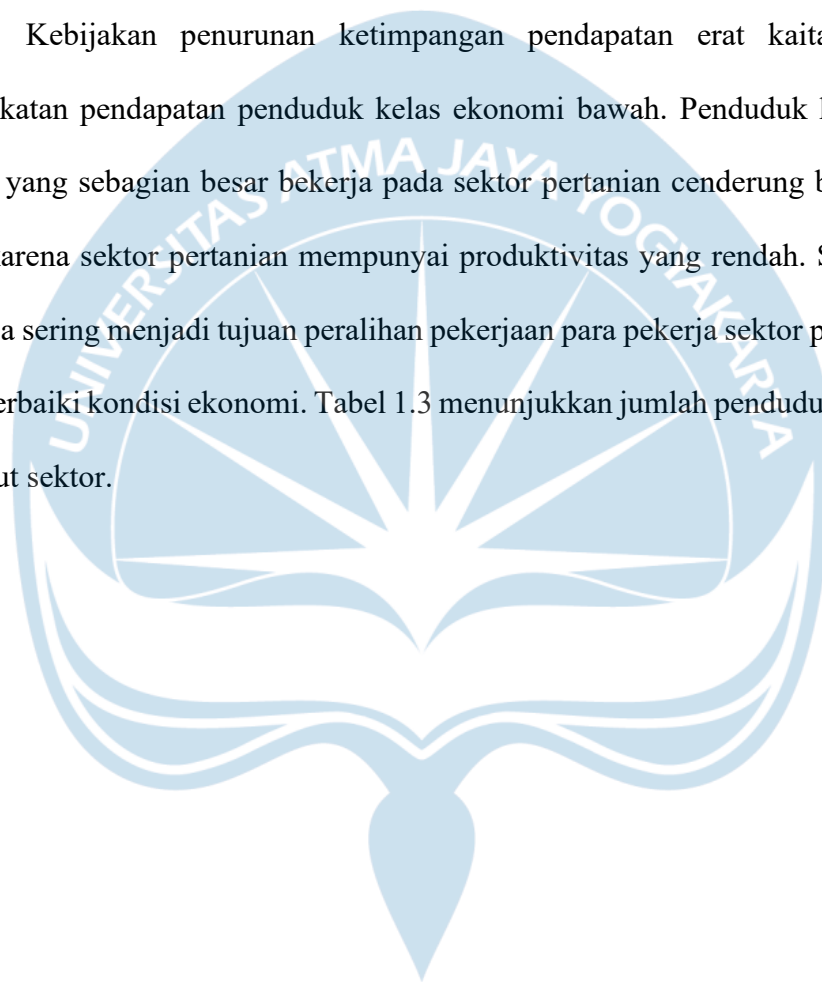
**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori**

Kategori/Industri/ Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2014-2018	Andil pertumbuhan 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1. Pertanian	-2,10	2,11	1,46	1,94	2,16	1,92	0,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,11	0,13	0,42	3,39	10,59	3,55	0,06
3. Industri Pengolahan	3,82	2,13	5,07	5,74	5,12	4,50	0,66
4. Pengadaan Listrik, Gas	6,83	2,19	14,26	3,96	3,31	5,82	0,01
5. Pengadaan Air	3,91	2,90	2,36	6,94	5,13	3,46	0,01
6. Konstruksi	5,65	4,24	5,42	5,72	13,10	7,39	1,25
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,69	6,19	6,09	4,75	5,54	5,88	0,47
8. Pengangkutan & Pergudangan	3,80	3,73	4,61	6,21	6,60	4,92	0,36
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	5,77	5,5,1	6,14	6,77	6,07	0,64
10. Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	2,80	6,48	6,51	0,72
11. Jasa Keuangan	8,27	8,27	5,98	4,94	6,14	5,53	0,22
12. Riil Estat	7,77	6,05	5,14	5,86	5,54	5,41	0,40
13. Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	4,51	5,51	5,55	0,06
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,57	5,57	5,56	4,06	4,93	0,31
15. Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,84	6,01	5,46	0,53
16. Jasa Kesehatan	7,65	7,15	4,53	5,76	6,05	5,89	0,16
17. Jasa lainnya	5,29	8,00	5,70	5,26	6,19	6,41	0,17
PDRB	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20	5,36	6,20

Sumber : BPS DIY (2019)

Lapangan usaha di sektor jasa dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,36%, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di kategori konstruksi yang mencapai 7,39%. Pada tahun 2018, kategori konstruksi dan pertambangan dan penggalian pertumbuhannya sangat signifikan, terutama didorong oleh pembangunan bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo. Kontribusi ekonomi 2018 yang sebesar 6,2% tertinggi disumbang oleh kategori konstruksi, diikuti oleh informasi dan komunikasi, industri pengolahan, dan penyedia akomodasi makan minum.

Kebijakan penurunan ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan penduduk kelas ekonomi bawah. Penduduk kelas ekonomi bawah yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian cenderung berpenghasilan kecil karena sektor pertanian mempunyai produktivitas yang rendah. Sektor industri dan jasa sering menjadi tujuan peralihan pekerjaan para pekerja sektor pertanian untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor.





**Tabel 1.3**  
**Penduduk Bekerja Menurut Sektor (Orang)**

Sub Elemen	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan</b>	436.529,00	475.346,00	451.861,00	432.057,00	405.775,00
<b>Industri Pengolahan</b>	276.386,00	262.108,00	325.061,00	346.919,00	363.939,00
<b>Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel</b>	485.393,00	589.955,00	553.726,00	601.093,00	605.995,00
<b>Jasa Kemasyarakatan</b>	401.802,00	432.765,00	397.658,00	294.847,00	451.667,00

Sumber : BAPPEDA DIY (2019)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan penyerapan tenaga kerja di sektor primer, sekunder dan tersier terhadap ketimpangan pendapatan di DIY. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tenaga kerja sektor primer, sekunder dan tersier, sedangkan variabel independennya adalah koefisien Gini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor primer terhadap ketimpangan pendapatan di DIY?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor sekunder terhadap ketimpangan pendapatan di DIY?

3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor tersier terhadap ketimpangan pendapatan di DIY?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor primer terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor sekunder terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor tersier terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor primer, sekunder dan tersier terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian selanjutnya.
3. Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Wilayah DIY dalam membuat kebijakan yang dapat menangani fenomena ketimpangan pendapatan yang ada di Wilayah DIY.

4. Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa tahap akhir sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

### 1.5. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel pertumbuhan tenaga kerja sektor primer berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.
2. Diduga variabel pertumbuhan tenaga kerja sektor sekunder berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.
3. Diduga variabel pertumbuhan tenaga kerja sektor tersier berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis seperti yang diuraikan berikut ini :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

**BAB III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

**BAB IV. Hasil Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

**BAB V. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam penelitian, serta saran-saran yang disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun penelitian selanjutnya

